

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

# KJP Plus Dialihkan ke Sekolah Gratis

JAKARTA, KOMPAS — Warga berharap bukan hanya ada penambahan jumlah sekolah swasta gratis di Jakarta. Jika memungkinkan, ada anggaran untuk bantuan pembelian biaya perlengkapan sekolah dan buku yang selama ini membebani keuangan keluarga kurang mampu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah hingga 2.900 sekolah swasta gratis dari SD sampai SMA atau sederajat mulai tahun 2025. Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman itu di DPRD DKI Jakarta, Jumat (23/8/2024). Sumber anggarannya berasal dari pengalihan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Ida (43), warga Kampung Luar Batang, Jakarta Utara, langsung setuju dengan rencana penambahan jumlah sekolah swasta gratis. Apalagi, anaknya masuk sekolah swasta karena tidak lolos penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan KJP Plus-nya dicabut sejak akhir tahun 2023.

"Enggak apa-apa tidak ada KJP Plus asal semua biaya dan kebutuhan sekolah gratis. Daripada KJP Plus banyak disalahgunakan," ujarnya pada Minggu (25/8).

Ida punya empat anak. Dua anak usia sekolah, SMP dan SMK, serta dua anak lainnya masih balita. Ia sepenuhnya ibu rumah tangga, sedangkan sang suami bekerja dengan gaji upah minimum regional (UMR) Jakarta, Rp 5,06 juta.

Keluarganya masih menumpang di rumah kakak di Luar Batang. Tak mengherankan ia bingung saat KJP Plus anaknya dicabut setelah pendataan tahun 2023.

"Kami (orangtua) isi surat.

Ada pertanyaan harta Rp 1 miliar. Boro-boro, buat nabung aja enggak ada uangnya," katanya.

Ia berharap Pemprov DKI Jakarta merealisasikan penambahan jumlah sekolah swasta gratis.

Warga Luar Batang lainnya, Sofia (50), berharap hal serupa. Ia kelompok KJP Plus anaknya dicabut karena dianggap dari keluarga mampu.

"Saya bilang ibu (tim pemeriksa) ke rumah saya saja. Nge-cek saya mampu atau enggak. Saya orangtua tunggal, masih numpang orangtua," ujarnya.

Sofia berdagang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun, belakangan ini ia istirahat lantaran sakit.

Sriwati (52), warga Penjaringan, Jakarta Utara, turut mendukung penambahan jumlah sekolah swasta gratis. Selama ini keluarganya kerepotan memenuhi kebutuhan sekolah anaknya di salah satu SMP swasta.

"KJP Plus bagus, tetapi kebutuhan sekolah anak, kan, banyak. Beli buku, pulpen, kaus kaki. Belum kalau anak pengin susu, jajan buah. Harus pintar-pintar diatur, mana untuk sekolah, mana untuk subsidi pangan," ucapnya.

Sri dan suami tiap hari berjualan makanan. Mereka merogoh kocek Rp 10.000 per hari atau Rp 300.000 per bulan untuk sewa lapak. Di sisi lain, pendapatannya tak menentu. Ketika ramai pembeli bisa mencapai ratusan ribu.

## Disetujui

KJP Plus merupakan program strategis yang memberikan akses kepada warga usia sekolah dari keluarga tidak mampu agar mereka dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau program pening-

katan keahlian yang relevan.

Syarat penerimanya, yakni siswa berusia 6-21 tahun, terdaftar pada sekolah negeri atau swasta di Jakarta, memiliki nomor induk kependudukan dan berdomisili di Jakarta, serta memenuhi salah satu kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Setiap bulan mereka menerima biaya rutin dan biaya berkala, disesuaikan dengan jenjang pendidikan.

Pada 2024 anggaran KJP Plus ditambah seiring kenaikan jumlah penerima manfaat. Jumlah penerima KJP Plus naik dari 445.303 menjadi 533.649 orang dengan anggaran Rp 2,46 triliun.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan bahwa penambahan jumlah sekolah swasta gratis mencapai 2.900 dari jenjang SD hingga SMA atau sederajat pada 2025. Penambahan ini juga sudah disetujui oleh DPRD dan tercukupi dari sisi anggaran.

"Untuk KJP Plus otomatis kami alihkan ke sana (sekolah gratis). Masih kami dalam angkanya, tetapi sudah bisa terpenuhi semua dari anggaran KJP Plus," kata Budi.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menyatakan akan ada penyesuaian atau perbaikan dan tahapan yang harus dilakukan sampai penambahan jumlah sekolah swasta gratis berjalan tahun 2025. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan tidak ada lagi cerita anak putus sekolah atau terhambat karena alasan ekonomi.

"Yang penting kami sepakat ingin menjalankan sekolah swasta gratis pada 2025. KJP Plus tidak ada lagi, dihapus. Anggarannya dialokasikan untuk sekolah gratis," ujarnya.

(DAN)